

DINAMIKA KEKUATAN-KEKUATAN POLITIK LOKAL DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI KABUPATEN BULELENG (BALI)

KM. PASEK TRISNA D.A.

2009

KKB KK -2 Fis P 20 09

Drs Wisnu Pramutanto

LOCAL ELECTIONS

Pilkada Buleleng yang dilaksanakan pada 12 Juni 2007 menghadirkan fenomena menarik seputar dinamika kekuatan-kekuatan politik lokal, partisipasi politik masyarakat, dan konflik-konflik yang terjadi. Kenyataan kentalnya kultur budaya Bali dan agama Hindu memang menjadi ciri khas masyarakat Bali, terutama masyarakat Buleleng. Namun di dalam Pilkada Buleleng tidak menunjukkan bahwa variabel kultural dan agama menjadi variabel utama.

Variabel-variabel kultural seperti kasta, *aud kelor*, dan keyakinan-keyakinan kultural lainnya tidak mempengaruhi pola masyarakat dalam memilih. Pun demikian dengan peran elit-elit tradisional yang turut bermain di dalam Pilkada tersebut. Masyarakat telah menjadi lebih rasional dan pragmatis sehingga tidak mudah diprovokasi dengan simbol-simbol kultural. Begitupun variabel ideology yang kurang lebih sama dengan variabel kultural itu.

Loyalitas elit-elit politik (tertuju kepada para kandidat yang berkompetisi dalam Pilkada Buleleng) hanya sebatas pada loyalitas berbasis kepentingan (yang cenderung bersifat pragmatis dan jangka pendek). Artinya, sejauh partai politik bersedia untuk mendukung kepentingan elit-elit itu untuk maju dalam Pilkada, maka elit-elit itu akan mensuplai kebutuhan-kebutuhan partai politik, yang secara tidak langsung sebenarnya merupakan kebutuhan-kebutuhan politik elit-elit itu juga. Namun, apabila partai politik yang dikehendaki oleh elit-elit itu tidak memberi dukungan maka mereka akan berganti kendaraan politik (bahkan apabila elit-elit itu telah mempunyai keterikatan keanggotaan terhadap partai politik seperti kartu tanda anggota, terdaftar sebagai kader, bahkan pengurus partai politik yang tidak bersedia mendukungnya).

Di samping itu—sekaligus kesimpulan atas rumusan masalah kedua penelitian skripsi ini—konflik-konflik yang muncul sepanjang proses Pilkada di Buleleng tidak disebabkan oleh politik *aud kelor* sebagaimana tradisi konflik di Bali, melainkan hanya sebatas konflik-konflik berbasis kepentingan yang bersifat pragmatis dan jangka pendek. Pun konflik itu tidak berlangsung dalam waktu yang lama apalagi sampai mewaris kepada generasi di bawah (tahunan).

Alhasil, sebagai wilayah yang terkenal rawan konflik, Buleleng—sekaligus merupakan barometer politik Bali—dapat melewati proses Pilkada bupati dengan sukses tanpa konflik berdarah-darah. Keberhasilan ini merupakan sebuah prestasi yang kiranya patut diapresiasi untuk pembelajaran politik warga Buleleng ke depan.

Kata Kunci: Pilkada Buleleng, Konflik, Dinamika Politik

